

Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah (Kasus pada Kabupaten Lampung Timur)

A. Khaliq^{a)}, A.V.S. Hubeis^{b)}, dan Mintarti^{b)}

^{a)} Sekolah Tinggi Pertanian (STIPER) Surya Dharma Jl. Ki Maja 66 Pertama-Way Halim Kedaton Bandar Lampung Telp.0721-783 783 787 ^{b)} Mayor Komunikasi Pembangunan, Gedung Departemen KPM IPB Wing 1 Level 5, Jalan Kamper Kampus IPB Darmaga, Telp.0251-8425252, Fax. 0251-8627797

Abstrak

Main subject of this research was behavioral of communication at gender mainstreaming study case in Regional Government of East Lampung District. The objectives of the research were; (1) to studied relationship between characteristics of individual with perception and participation the Government staff in gender mainstreaming at regional autonomy, (2) to studied relationship between behavioral communication with perception and participation the government staff in gender mainstreaming at regional autonomy, (3) to studied relationship between characteristic of interpersonal communication with their communication behavior in gender mainstreaming at regional autonomy era. The goals of this research are to know how important behavioral, perception and participation to gender mainstreaming in Regional Government of East Lampung District. Respondent in this research were about 68 from 676 of the structural staff in Regional Government of East Lampung District. The method type in this research was descriptive co-relational survey. Result of this research is indicated that there were significant correlation between several indicators on independent variables and perception and also participation in gender mainstreaming.

Keyword: Behavioral Communication, Perception and Participation, Gender Mainstreaming

1. Pendahuluan

Pada Konferensi Wanita Sedunia keempat yang diselenggarakan di Beijing tahun 1995, istilah pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) tercantum di *Beijing Platform of Action*, yang berbunyi: *Gender mainstreaming is a strategy for integrating gender concerns in the analysis formulation and monitoring policies, programs and projects*. Semua negara-negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konferensi itu, secara eksplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender di negara dan tempat masing-masing (Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, BKKBN, UNFA 2002).

Sampai saat ini para pembuat kebijakan dan kaum perempuan sendiri belum sensitif melihat pentingnya perubahan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Walaupun Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan

telah merumuskan visinya yang berbunyi “Terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender, kesejahteraan dan perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara” namun dalam pelaksanaannya di era otonomi daerah masih ditemukan berbagai kendala, seperti rendahnya kualitas sumberdaya manusia (SDM) pegawai negeri sipil khususnya SDM perempuan di tingkat kabupaten

Perilaku komunikasi aparat pemerintah kabupaten dalam melaksanakan pengarusutamaan gender yang merupakan strategi untuk pencapaian tujuan otonomi, memegang peranan penting. Beberapa faktor yang diduga mempengaruhi aktivitas mereka dalam pengarusutamaan gender, diantaranya adalah karakteristik individu. Perilaku komunikasi dan karakteristik individu aparat menentukan tingkat partisipasi dalam terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender sebagai indikator

Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah

keberhasilan aparat Pemda dalam PUG ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dengan laik-laki, memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan.

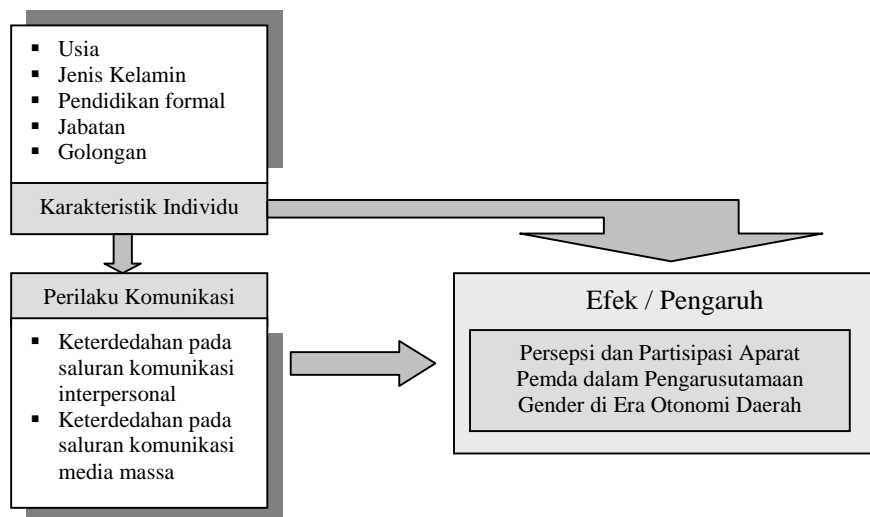
Karena alasan tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui perilaku komunikasi aparat Pemda Kab. Lampung Timur dalam pengarusutamaan gender. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : (1) mengkaji hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi aparat Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah, (2) mengkaji hubungan antara karakteristik individu aparat Pemda dengan perilaku komunikasi mereka dalam Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah dan (3) mengkaji hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi

dan partisipasi aparat Pemda dalam Pengarusutamaan Gender di era Otonomi Daerah.

1.1 Kerangka Pemikiran

Untuk mengetahui faktor apakah yang diperkirakan berhubungan perilaku komunikasi aparat Pemda Kab. Lampung Timur dalam pengarusutamaan gender. Berikut ini ditampilkan kerangka pemikiran pada Gambar 1.

Perbedaan karakteristik individu (usia, jenis kelamin, pendidikan formal, jabatan dan golongan) diduga mempengaruhi perilaku komunikasi personil aparat pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender. Perbedaan karakteristik individu aparat dan perilaku komunikasinya diduga mempengaruhi persepsi dan partisipasi aparat pemerintah daerah dalam pengarusutamaan gender.



Gambar 1. Kerangka pikir hubungan antara karakteristik, perilaku komunikasi serta persepsi dan partisipasi aparat Pemda Kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era otonomi daerah.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi aparat Pemda kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era otonomi daerah.
2. Terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan perilaku komunikasi aparat Pemda kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era otonomi daerah.
3. Terdapat hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi aparat Pemda kabupaten dalam pengarusutamaan gender di era otonomi daerah.

1.2 Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif korelasional, dengan teknik pengumpulan data melalui koesioner dan wawancara. Penelitian dilakukan pada bulan Oktober sampai Desember 2005 di Pemda Kab. Lampung Timur. Responden dalam penelitian ini adalah 68 orang dari 676 orang yang menduduki jabatan struktural di Pemda Kab. Lampung Timur. Pengujian hipotesis adalah dengan menggunakan analisis statistik Chi Square untuk jenis kelamin dan koefisien Rank Spearman untuk menganalisis koefisien korelasi.

2. Hasil dan Pembahasan

2.1 Gambaran Pelaksanaan Program Pengarusutamaan Gender (PUG)

Sejak dilaksanakannya otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 setiap kabupaten/kota telah membangun struktur administrasi pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Secara umum, pemerintah kabupaten dipimpin oleh seorang Bupati. Di bawah Bupati ada Wakil

Bupati dan Sekretariat Daerah yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah. Sekretaris Daerah dibantu oleh beberapa asisten dan di bawah para asisten adalah kepala-kepala bagian yang membawahi beberapa kepala sub-bagian dan staf. Variasi akan struktur pemerintah daerah akan dijumpai pada tingkat asisten ke bawah. Jumlah asisten, bagian, dan sub-bagian di setiap kabupaten/kota berbeda-beda dan unik untuk setiap kabupaten/kota.

Untuk melaksanakan program Pengarusutamaan Gender (PUG) di Kabupaten Lampung Timur belum ada kekuatan hukum yang mengikat, baik yang berbentuk peraturan daerah maupun instruksi bupati. Hal ini berakibat pada belum tersosialisasinya secara meluas di kalangan aparat tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah, walaupun Instruksi Gubernur Lampung tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah telah ada sejak tahun 2002. Sampai saat ini jika ada kegiatan yang berkaitan dengan gender baru bisa ditangani oleh Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan di bawah Bagian Sosial Sekretariat Pemda Kabupaten Lampung Timur. Hal ini tentu akan berbeda jika yang menangani kegiatan gender adalah bagian khusus atau bahkan dinas khusus jika dibandingkan dengan kabupaten/kota yang ada di daerah lain. Kabupaten Lampung Timur belum maksimal dalam memperjuangkan status struktur kelembagaan pemerintahan yang membidangi pemberdayaan perempuan.

Di dalam Perencanaan Strategik (Renstra) Tahun 2001 – 2005 Bagian Sosial Setda Kabupaten Lampung Timur, mencantumkan 6 (enam) kebijakan yang dilakukan, yaitu: (1) memantapkan koordinasi dinas/instansi di wilayah Kabupaten Lampung Timur, (2) orientasi peningkatan sumberdaya manusia melalui pelatihan, (3)

*Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan
Gender di Era Otonomi Daerah*

memantapkan pendidikan yang religius, (4) memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat, (5) mendorong upaya tindakan preventif daripada kuratif, dan (6) mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan.

2.2 Kondisi Sumberdaya Perempuan dalam Bidang Pendidikan

Hasil Susenas Tahun 2004 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Lampung Timur yang berumur 10 tahun ke atas yang tergolong buta huruf mencapai angka 7,95 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan pada tahun 2002 dan tahun 2003 yang mencapai angka 18,52 persen dan 10,94 persen atau ada peningkatan jumlah penduduk yang melek huruf (dapat baca tulis).

Jumlah penduduk yang tergolong buta huruf tersebut terdiri dari perempuan sebanyak 51.318 Jiwa, sedangkan penduduk laki-laki berjumlah 20.672 Jiwa.

Dari jumlah penduduk sekitar 909 ribu jiwa, 79,68 persen diantaranya adalah penduduk berumur 10 tahun ke atas. Tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Lampung Timur secara kualitas masih perlu ditingkatkan, terbukti dari masih tingginya persentase penduduk yang tidak/belum tamat SD sebesar 36,35 persen dan sebagian besar yang tidak/belum tamat SD adalah perempuan sebesar 40,80 persen. Tabel 1 menunjukkan bahwa untuk seluruh jenjang pendidikan, jumlah perempuan yang bersekolah lebih sedikit jika dibandingkan dengan laki-laki.

Tabel 1

Persentase Penduduk Usia 10 Tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2004

Pendidikan	Perempuan	Laki-laki	Total
Tdk/Belum Tamat SD	40,80	32,21	36,35
SD/Sederajat	31,77	33,46	32,64
SLTP/Sederajat	17,73	20,55	19,19
SLTA/Sederajat	9,12	12,66	10,96
D1 Ke atas	0,58	1,12	0,86
Jumlah	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Timur, 2004

2.3 Kondisi Sumberdaya Perempuan di Sektor Publik/Pemerintahan

Kedudukan dan peran perempuan dalam sektor publik atau pemerintahan masih rendah. Sampai dengan tahun 2005 hanya terdapat satu orang camat perempuan di Lampung Timur yaitu di

Kecamatan Sukadana. Bahkan dari lima kelurahan di kecamatan Sukadana tidak satupun ada lurah yang perempuan, dan dari 233 Kepala Desa hanya 7 (tujuh) kepala desa yang dijabat oleh perempuan (Tabel 2).

Tabel 2
Jumlah Kepala Daerah Menurut Wilayah Pemerintahan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, Tahun 2005

Wilayah Pemerintahan	Kepala Daerah		
	Perempuan	Laki-laki	Total
Desa	7	226	233
Kelurahan	0	5	5
Kecamatan	1	22	23
Kabupaten	0	1	1

Sumber: BKD Pemda Kabupaten Lampung Timur, 2005

Tabel 3 menunjukkan bahwa tidak ada seorangpun perempuan yang menduduki jabatan eselon II, untuk eselon III persentase pejabat wanita hanya 4,69 persen, dan eselon IV hanya 11,07 persen. Secara keseluruhan

perempuan yang menduduki jabatan pada eselon III dan IV hanya 9,47 persen, sedangkan laki-laki yang menduduki jabatan eselon II, III dan IV sebesar 90,53 persen.

Tabel 3
Jumlah Pejabat yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon dan Jenis Kelamin di Kabupaten Lampung Timur, 2005

Eselon	Perempuan (%)	Laki-laki (%)	Total (%)
II	-	100	100
III	4,69	95,31	100
IV	11,07	88,93	100
Jumlah	9,47	90,53	100

Sumber: BKD Pemda Kabupaten Lampung Timur, 2005

2.4 Karakteristik Responden

Karakteristik responden di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur yang diamati dan diduga berhubungan nyata secara statistik dengan persepsi dan partisipasi aparat dalam pelaksanaan program PUG, meliputi (1) usia, (2) jenis kelamin, (3) pendidikan, (4) jabatan, (5) golongan (Tabel 4-7).

2.4.1 Usia

Tabel 4 menunjukkan bahwa sebaran usia responden bervariasi dari 20 tahun sampai lebih dari 41 tahun. Responden dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 68 orang yang terdiri dari 48 orang laki-laki (70,6%)

dan 20 orang (29,4%) perempuan. Usia perempuan terbanyak adalah pada kelompok usia 31-40 tahun yaitu pada kategori dewasa. Akan tetapi untuk laki-laki terbanyak pada kelompok usia di atas 41 tahun yaitu pada kategori tua. Hal ini disebabkan antara lain, pada awal pembentukan Kabupaten Lampung Timur (Pemekaran Kabupaten Lampung Tengah) pada Tahun 1999, jumlah pegawai yang berminat pindah ke Lampung Timur dari Lampung Tengah terbanyak adalah laki-laki.

Pertimbangan keluarga menjadi alasan bagi mereka untuk tidak berminat pindah ke Lampung Timur, antara lain karena tidak direstui oleh suami bagi mereka yang sudah

*Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan
Gender di Era Otonomi Daerah*

berkeluarga dan tidak diizinkan oleh orang tua bagi mereka yang masih belum berkeluarga. Baru pada tahun 2002, ada penerimaan pegawai baru

sehingga terjadi penambahan jumlah pegawai perempuan yang sekaligus diterima sebagai CPNS.

Tabel 4

Jumlah dan Persentase Responden Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berdasar Usia dan Jenis Kelamin, Tahun 2005

Kategori Usia	Jenis Kelamin		Jumlah	Persentase (%)
	Laki-laki	Perempuan		
20-30 tahun	0	4	4	5,9
31-40 tahun	16	12	28	41,2
> 41 tahun	32	4	38	52,9
Total	48	20	68	100

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

2.4.2 Jenis Kelamin

Berdasarkan jenis kelamin, mayoritas responden terpilih yang menduduki jabatan struktural di Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berjenis kelamin laki-laki, yakni sebanyak 48 orang (70,6%) dan responden perempuan sebanyak 20 orang (29,4%). Jumlah responden laki-laki yang lebih banyak ini terjadi karena pada saat penarikan sampel peluang laki-laki lebih besar untuk dipilih dimana populasi jabatan struktural yang diduduki oleh laki-laki adalah sebanyak 612 (90,53%) dari 676 jabatan struktural. Untuk penyebaran data berdasar perbedaan gender maka hanya terdapat empat (4) responden pejabat struktural perempuan yang berusia kurang dari 30 tahun. Sementara tidak ada pejabat struktural laki-laki yang berusia di bawah 30 tahun. Kondisi tersebut berbeda pada responden yang berusia lebih dari 41 tahun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa jumlah responden pejabat struktural laki-laki berjumlah 32 responden atau sebesar

47,1 persen dibanding dengan hanya 4 responden atau sebesar 5,9 persen pejabat struktural perempuan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden pejabat struktural di pemda Kabupaten Lampung Timur masih lebih banyak dijabat oleh laki-laki dengan kategori tua yaitu telah berusia di atas 41 tahun. Selanjutnya dari data yang diperoleh maka jumlah responden pejabat struktural yang berusia antara 30 tahun-40 tahun dengan kategori dewasa berjumlah 16 pejabat struktural laki-laki atau sebesar 23,53 persen dan 12 pejabat struktural perempuan atau sebesar 17,65 persen.

2.4.3 Pendidikan

Pendidikan responden aparat di Kabupaten Lampung Timur terbanyak adalah sarjana (S1) pada kategori tinggi, dan ini berlaku sama baik pada aparat perempuan maupun laki-laki. Bahkan aparat perempuan ada yang berpendidikan S2 (kategori sangat tinggi) sedangkan laki-laki tidak ada (Tabel 5).

Tabel 5
Jumlah dan Persentase Responden Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berdasar Pendidikan dan Jenis Kelamin, 2005

Kategori Pendidikan	Jenis Kelamin		Persentase (%)		Total	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
SMA	6	4	12,50	20,00	10	14,7
Diploma	9	1	18,75	5,00	10	14,7
S 1	33	11	68,75	55,00	44	64,7
S 2	0	4	0,00	20,00	4	5,9
Total	48	20	100,00	100,00	68	100,0

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

Untuk tingkat pendidikan strata satu (S1) jumlah responden laki-laki yang berpendidikan S1 secara kumulatif dibandingkan dengan responden perempuan cukup berbeda, yaitu 33 orang dari 48 responden (68,75%) sedangkan perempuan 11 orang dari 20 responden (55,0%). Secara umum pejabat-pejabat struktural di Pemda Kabupaten Lampung Timur telah berpendidikan S1, sedangkan tingkat pendidikan terendah SMA.

2.4.4 Jabatan

Tabel 6 menunjukkan bahwa berdasar tingkat jabatan sebagian besar jabatan responden adalah Kasubbag atau eselon IV-A, yaitu sebanyak 36 orang atau sebesar 52,9 persen. Sementara itu, 22 responden atau sebesar 32,5 persen mempunyai jabatan sebagai Kepala Seksi (Kasi) atau setara dengan eselon IV-A, dan sebagai Kepala Bagian atau

eselon III-A berjumlah 6 responden atau sebesar 8,8 persen. Untuk jabatan kepala sub-dinas dan camat masing-masing berjumlah 2 responden atau sebesar 2,9 persen.

Penyebaran jabatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin menunjukkan bahwa untuk jabatan Kepala Bagian yang merupakan jabatan level tinggi dalam struktur pemerintahan daerah, tidak ada satupun responden perempuan yang menduduki jabatan tersebut.

Untuk jabatan Kasubbag tercatat sebanyak 27 orang laki-laki dari 48 responden atau sebesar 56,25 persen dan perempuan sebanyak sembilan orang dari 20 responden atau sebesar 45,00 persen. Sedangkan untuk jabatan Kepala Seksi jumlah pejabat struktural laki-laki sebanyak 12 orang dari 48 responden atau sebesar 25 persen sedangkan perempuan sebanyak 10 orang dari 20 responden atau sebesar 50 persen.

Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah

Tabel 6

Jumlah dan Persentase Responden Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin, 2005

Kategori Jabatan	Jenis Kelamin		Persentase (%)		Total	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Kasi	12	10	25,00	50,00	22	32,5
Kasubbag	27	9	56,25	45,00	36	52,9
Kasubdin	2	0	4,17	0,00	2	2,9
Camat	1	1	2,08	5,00	2	2,9
Kabag	6	0	12,50	0,00	6	8,8
	48	20	100,00	100,00	68	100,00

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

2.4.5 Golongan

Sebanyak 58 responden aparat (85.3%) yang menjadi responden penelitian lebih banyak berasal dari

golongan III (baik golongan III/a sampai III/d). Sebanyak 10 orang responden atau 14,7 persen telah memiliki golongan IV (Tabel 7).

Tabel 7

Jumlah dan Persentase Responden Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin, 2005

Kategori Golongan	Jenis Kelamin		Persentase (%)		Total	
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	%
Golongan III	40	18	83,33	90,00	58	85,3
Golongan IV	8	2	16,67	10,00	10	14,7
	48	20	100,00	100,00	68	100

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

Berdasarkan perbedaan jenis kelamin, sebanyak 40 orang laki-laki dari 48 responden atau sebesar 83,33 persen dan sejumlah 18 orang perempuan dari 20 responden atau sebesar 90,00 persen termasuk dalam golongan III. Sementara pada responden bergolongan IV diperoleh data bahwa pejabat struktural laki-laki berjumlah 8 orang dari 48 responden atau sebesar 16,77 persen sedangkan pejabat struktural perempuan sebanyak 2 orang dari 20 responden atau sebesar 10,00 persen. Secara proporsional golongan III didominasi oleh responden perempuan (90%), sedangkan golongan

IV didominasi oleh responden yang berjenis kelamin laki-laki (16,67%).

Dari hasil wawancara mendalam dengan responden dan setelah dibandingkan dengan data lapangan yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa peran perempuan di sektor pemerintahan masih relatif kecil. Hal ini antara lain disebabkan oleh berbagai kendala seperti nilai dan norma masyarakat setempat yang masih mempersepsikan peran utama perempuan hanya di sektor domestik. Misalnya, norma di masyarakat yang menyatakan bahwa anak perempuan lebih diperlukan dalam membantu

orang tua menyelesaikan tugas sehari-hari di rumah, sedang anak laki-laki bertanggungjawab dalam membantu menambah pendapatan rumahtangga yang akhirnya merupakan alasan kuat untuk menempatkan laki-laki di sektor publik.

2.5 Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah

Faktor yang berhubungan dengan perilaku komunikasi Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur yang diamati dalam PUG adalah keterdedahan pada saluran komunikasi

interpersonal dan keterdedahan pada saluran komunikasi massa. Gambaran perilaku komunikasi Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur dalam PUG dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8 memperlihatkan bahwa sebanyak 58,82 persen dari aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur mengalami keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal dalam PUG, seperti diskusi, seminar-seminar, rapat-rapat dinas, maupun obrolan tergolong pada kategori rendah, terdiri dari 28 orang laki-laki (58,33%) dari 48 responden dan 12 orang perempuan (60%) dari 20 responden.

Tabel 8
Jumlah dan Persentase Responden Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Perilaku Komunikasi dan Jenis Kelamin, 2005

No	Perilaku Komunikasi	Kategori	Jenis Kelamin		Persentase (%)		Total	
			Lk	Pr	Lk	Pr	Jml	%
1	Keterdedahan pada saluran komunikasi interpersonal	Tinggi	10	4	20,83	20,00	14	20,59
		Sedang	10	4	20,83	20,00	14	20,59
		Rendah	28	12	58,33	60,00	40	58,82
		Total	48	20	100,00	100,00	68	100,00
2	Keterdedahan pada saluran komunikasi massa	Tinggi	4	2	8,33	10,00	6	8,82
		Sedang	28	11	58,33	55,00	39	57,35
		Rendah	16	7	33,33	35,00	23	33,82
		Total	48	20	100,00	100,00	68	100,00

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

Keterangan: Lk = laki-laki ; Pr = Perempuan; Jml= Jumlah

Rendahnya keterdedahan responden terhadap informasi PUG diakibatkan oleh kurangnya penerimaan informasi mengenai hal tersebut. Selama ini kegiatan sosialisasi tentang gender dan PUG hampir tidak pernah dilaksanakan kecuali pada awal dibentuknya bagian pemberdayaan perempuan dalam struktur Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Kegiatan sosialisasi PUG lebih banyak dilaksanakan langsung oleh

Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung dengan mengundang peserta dari kabupaten/kota. Kegiatan sosialisasi PUG yang selama ini dilakukan lebih banyak berupa sosialisasi dengan dana stimulan dari KPP-RI yang disalurkan melalui Biro Pemberdayaan Perempuan Propinsi Lampung yang berada di bawah Bagian Sosial yaitu Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan pelatihan teknis, seperti Pelatihan Kader

Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah

Posyandu dan BKB yang berbasis gender lebih banyak ditujukan kepada aparat perempuan dari Dinas/Instansi yang berwenang mensosialisasikan PUG di lingkup aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur. Kemudian kegiatan ini diturunkan ke tiap unit kerja melalui atasan masing-masing unit kerja. Padahal menurut responden, yang berwenang menginformasikan permasalahan gender seharusnya adalah dari bagian pemberdayaan perempuan dan bukan dari atasan langsung unit kerja karena atasan langsung mereka tidak menguasai persoalan gender.

Dampak yang terjadi yaitu sebagian besar aparat laki-laki belum mengerti tentang makna gender. Dari 48 responden laki-laki hanya 10 responden yang mempersepsikan gender dengan benar yaitu bisa menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari dan disosialisasikan, sisanya 10 responden menyatakan ragu-ragu dan 28 responden memaknai gender sebagai jenis kelamin perempuan.

Keterdedahan aparat di Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Timur pada saluran komunikasi massa sebagian besar tergolong pada kategori sedang, yaitu ditemukan pada 39 responden (57,35%), yang terdiri dari 28 orang laki-laki dari 48 responden (58,33%) dan 11 orang perempuan dari 20 responden (55%).

Media massa yang dapat diakses oleh mereka adalah surat kabar, televisi, radio, leaflet, spanduk, dan selebaran. Informasi yang mereka peroleh dari media tersebut umumnya adalah tentang pemberdayaan perempuan secara umum dan bukan tentang PUG. Sebanyak 39 responden terdiri dari 28 laki-laki dan 15 perempuan atau sekitar 57,35 persen menyatakan

kadang-kadang terdedah terhadap saluran komunikasi massa dalam mencari informasi tentang PUG.

Hal ini menggambarkan bahwa informasi tentang PUG melalui saluran komunikasi massa *jarang menepa* para aparat di Pemerintahan Daerah Lampung Timur. Hal ini antara lain disebabkan oleh lokasi Kabupaten Lampung Timur yang terletak jauh dari pusat kota provinsi sehingga akses aparat terhadap informasi gender dari pusat kota menjadi relatif sulit.

Media massa yang dapat lebih mudah diakses, seperti televisi dan radio ternyata lebih banyak dimanfaatkan untuk memperoleh informasi yang bersifat hiburan. Sebaliknya untuk tayangan tentang gender hanya enam orang responden (4 laki-laki dan 2 perempuan) dari 68 responden yang menyatakan sering menyaksikan siaran tentang Pemberdayaan Perempuan melalui media massa elektronik, yaitu dari Lampung TV.

Keterdedahan masyarakat terhadap media komunikasi cetak juga lebih banyak digunakan untuk memperoleh hiburan. Koran lokal "Radar Lampung" yang paling sering dibaca oleh responden ternyata hanya rubrik yang bersifat hiburan dan berita ringan lainnya, dan tidak pernah ada rubrik khusus tentang gender atau PUG dalam media tersebut. Sebanyak 23 dari 68 responden (33,82%) menyatakan bahwa mereka tidak pernah membaca informasi tentang gender dari media cetak (koran lokal) dan media spanduk.

2.6 Persepsi dan Partisipasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) di Era Otonomi Daerah

Persepsi dan partisipasi merupakan salahsatu faktor yang diduga berhubungan dalam PUG di Pemerin-

tahan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Persepsi merupakan penilaian dan pernyataan Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur tentang PUG yang antara lain diukur dengan menggunakan Tujuh Program Pokok pembangunan pemberdayaan perempuan di era Otda serta kegiatan PUG dalam berbagai bidang pembangunan. Sedangkan partisipasi adalah keterlibatan fisik dan emosional responden yang mendorongnya untuk berkontribusi dalam pelaksanaan strategi PUG serta ikut bertanggungjawab dalam aktifitas tersebut (KPP, 2005).

Tabel 9 menunjukkan bahwa Aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur menyatakan setuju terhadap program PUG. Lebih dari 50 persen responden setuju dan sepakat dengan program-program PUG karena secara normatif konsep PUG dapat mereka terima, selain sudah merupakan program yang sudah ditetapkan dari pusat untuk dilaksanakan di daerah.

Mereka yang menyatakan tidak setuju karena umumnya masih ragu-ragu dalam melaksanakannya karena minimnya informasi yang mereka terima tentang PUG. Penyebab lain adalah ketiadaan petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) tentang PUG dari Sub Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Namun sebagian kecil aparat laki-laki masih ada yang tidak setuju dengan program PUG, sedangkan aparat perempuan hampir tidak ada yang

menyatakan tidak setuju dalam program PUG.

Tabel 10 menunjukkan bahwa sebanyak 70,58 persen responden menyatakan kadang-kadang berpartisipasi dalam perencanaan program PUG di masing-masing unit kerja. Hal ini disebabkan mereka belum memahami strategi PUG yang sudah menjadi program pemerintah pusat. Selain itu, kegiatan yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Pemberdayaan Perempuan juga masih terpisah dari masing-masing unit kerja, dan lebih banyak bersifat formalitas. Apalagi, belum adanya SK Bupati tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di Kabupaten Lampung Timur menyebabkan rendahnya partisipasi aparat dalam perencanaan program PUG karena payung hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan PUG dalam setiap kegiatan di masing-masing lembaga/instansi secara tertulis tidak ada. Begitu juga dengan petunjuk pelaksanaan serta petunjuk teknis tentang PUG sebagai dasar operasionalisasi program juga tidak ada. Hal ini diperkuat dengan sebanyak 67,65 persen responden yang menyatakan bahwa mereka kadang-kadang berpartisipasi dalam pelaksanaan program PUG, bahkan 50,00 persen responden menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam pemantauan dan evaluasi dari kegiatan tersebut dengan alasan seperti yang dikemukakan tentang ketiadaan aspek legalitas.

*Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan
Gender di Era Otonomi Daerah*

Tabel 9
Jumlah dan Persentase Responden Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Persepsi tentang Program PUG dan Jenis Kelamin, 2005

No	Program PUG	Persepsi	Jenis Kelamin		Persentase (%)		Total	
			Lk	Pr	Lk	Pr	Jml	%
1.	Tentang PUG dalam pembangunan nasional yang dilakukan melalui Kebijakan Satu Pintu (KSP) atau "One Door Policy"	Setuju	32	16	66,67	80	48	70,58
		Ragu-ragu	10	4	20,83	20	14	20,59
		Tidak setuju	6	0	12,50	0	6	8,83
2.	Tentang Kegiatan yang dilakukan dalam PUG	Setuju	31	15	64,58	75	46	67,65
		Ragu-ragu	13	5	27,08	25	18	26,47
		Tidak setuju	4	0	8,33	0	4	5,88
3.	Tentang Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan 2005-2009 mencakup 7 macam.	Setuju	35	17	72,92	85	52	76,47
		Ragu-ragu	11	3	22,92	15	14	20,59
		Tidak setuju	2	0	4,17	0	2	2,94
4.	Tentang Pentingnya Tujuh Program pokok pembangunan pemberdayaan perempuan di era Otonomi Daerah ini.	Setuju	37	15	77,08	75	52	76,47
		Ragu-ragu	9	5	18,75	25	14	20,59
		Tidak setuju	2	0	4,17	0	2	2,94
5.	Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Diklat	Setuju	35	15	72,92	75	50	73,53
		Ragu-ragu	9	5	18,75	25	14	20,59
		Tidak setuju	4	0	8,33	0	4	5,88
6.	Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesehatan	Setuju	37	17	77,08	85	54	79,41
		Ragu-ragu	7	3	14,58	15	10	14,71
		Tidak setuju	4	0	8,33	0	4	5,88
7.	Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan KB	Setuju	34	16	70,83	80	50	73,53
		Ragu-ragu	12	4	25,00	20	16	23,53
		Tidak setuju	2	0	4,17	0	2	2,94
8.	Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Ekonomi dan Ketenagakerjaan	Setuju	37	15	77,08	75	52	76,47
		Ragu-ragu	7	5	14,58	25	12	17,65
		Tidak setuju	4	0	8,33	0	4	5,88
9.	Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Politik dan Hukum	Setuju	33	13	68,75	65	46	67,65
		Ragu-ragu	13	7	27,08	35	20	29,41
		Tidak setuju	2	0	4,17	0	2	2,94
10.	Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Kesos dan Agama	Setuju	33	15	68,75	75	48	70,59
		Ragu-ragu	10	4	20,83	20	14	20,59
		Tidak setuju	5	1	10,42	5	6	8,82
11.	Tentang Kegiatan PUG dalam pembangunan Hankam	Setuju	32	12	66,67	60	44	64,71
		Ragu-ragu	14	8	29,17	40	22	32,35
		Tidak setuju	2	0	4,17	0	2	2,94

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

Keterangan: Lk = laki-laki ; Pr = Perempuan; Jml= Jumlah

Rendahnya partisipasi responden dalam pelaksanaan PUG selain disebabkan

kan oleh unsur ketidaktahuan, juga karena mereka tidak dilibatkan dalam

kegiatan yang responsif gender. Kurangnya pemahaman aparat tentang keharusan dari Inpres No. 9 tentang PUG yang mengharuskan tiap unit kerja memasukkan komponen gender mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program, menyebabkan tingkat partisipasi responden rendah. Hal ini diperkuat dengan adanya pemahaman parsial yang beranggapan bahwa yang berwenang dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program yang responsif gender hanya Sub

Bagian Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan sehingga tugas mensosialisasikan PUG kepada masing-masing unit kerja melalui atasan langsung terbebaskan kepada mereka. Inpres No. 9 sudah mewajibkan setiap daerah melaksanakan strategi PUG, karena di era Otda dikembalikan kepada kebijakan daerah untuk melaksanakannya, sehingga Surat Keputusan Bupati yang akan bisa mengadvokasi aparat untuk melaksanakan kegiatan PUG dengan baik.

Tabel 10
Jumlah dan Persentase Responden Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Timur Berdasarkan Partisipasi dalam Kegiatan PUG dan Jenis Kelamin, 2005

No	Kegiatan	Partisipasi	Jenis Kelamin			%
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1.	Perencanaan	Selalu	8	2	10	14,71
		Kadang-kadang	33	15	48	70,58
		Tidak Pernah	7	3	10	14,71
2.	Pelaksanaan	Selalu	0	0	0	0
		Kadang-kadang	30	16	46	67,65
		Tidak Pernah	18	4	22	32,35
3.	Pemantauan dan Evaluasi	Selalu	0	2	2	2,94
		Kadang-kadang	25	7	32	47,06
		Tidak Pernah	23	11	34	50,00

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

3.1 Hubungan Karakteristik Individu dengan Persepsi dan Partisipasi

Berdasarkan hasil analisis hubungan antara karakteristik individu berdasar jenis kelamin. Tabel 11 diketahui bahwa perilaku komunikasi, persepsi

dan komunikasi, persepsi dan partisipasi antara responden laki-laki dan perempuan berbeda secara nyata. Persepsi responden perempuan tentang PUG lebih baik dibandingkan dengan laki-laki dan hal ini juga mempengaruhi data partisipasinya.

Tabel 11
Uji Chi Square (χ^2) antara Karakteristik Jenis Kelamin dengan Perilaku Komunikasi, Persepsi dan Partisipasi

Korelasi	Koef. Kontingensi	(χ^2) hitung	(χ^2) Tabel	Keterangan
Jenis kelamin – perilaku komunikasi	0,562	31,393	26,296	Signifikan
Jenis kelamin – persepsi	0,488	21,204	18,307	Signifikan
Jenis kelamin – partisipasi	0,646	48,733	35,172	Signifikan

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan Gender di Era Otonomi Daerah

Untuk hasil korelasi antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi dapat dilihat pada Tabel 12. Karakteristik individu berdasarkan usia, pendidikan, jabatan dan golongan ternyata tidak mempunyai hubungan

signifikan dengan persepsi dan partisipasi.

Berdasarkan hasil pada Tabel 11 dan 12 maka hipotesis (H1) pertama yang menyatakan terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi tidak diterima.

Tabel 12

Uji korelasi antara karakteristik individu dengan persepsi dan partisipasi

Korelasi	Koefisien korelasi	t hitung	t Tabel	Keterangan
Usia – persepsi	-0,050	-0,396	1,9966	Tidak signifikan
Pendidikan – persepsi	0,076	0,642	1,9966	Tidak signifikan
Jabatan – persepsi	0,126	1,095	1,9966	Tidak signifikan
Golongan – persepsi	-0,015	-0,121	1,9966	Tidak signifikan
Usia – partisipasi	0,055	0,460	1,9966	Tidak signifikan
Pendidikan – partisipasi	0,108	0,929	1,9966	Tidak signifikan
Jabatan – partisipasi	0,150	1,322	1,9966	Tidak signifikan
Golongan – partisipasi	0,239	2,226	1,9966	Signifikan

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

3.2 Hubungan Perilaku Komunikasi dengan Persepsi dan Partisipasi

Hasil perhitungan hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi

dan partisipasi dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13

Hasil Uji Korelasi antara Perilaku Komunikasi dengan Persepsi dan Partisipasi

Korelasi	Koefisien korelasi	t hitung	t Tabel	Keterangan
Perilaku komunikasi– persepsi	0,219	2,013	1,9966	Signifikan
Perilaku komunikasi– partisipasi	0,457	5,038	1,9966	Signifikan

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

Pada Tabel 13 dapat dilihat bahwa koefisien korelasi antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi adalah signifikan. Hasil ini disimpulkan berdasarkan perbandingan uji t dimana nilai t hitung lebih kecil dari t Tabel. Hal ini berarti bahwa perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi berhubungan nyata.

yang kuat bahwa hipotesis kedua (H2) yang menyatakan terdapat hubungan antara perilaku komunikasi dengan persepsi dan partisipasi dapat dinyatakan diterima.

3.3 Hubungan Karakteristik Individu dengan Perilaku Komunikasi

Hasil perhitungan korelasi yang signifikan menunjukkan adanya bukti

Pada pembahasan ketiga ini akan dilihat hasil secara statistik hubungan antara karakteristik individu dengan

perilaku komunikasi. Hasil perhitungan keduanya dapat dilihat dalam Tabel 14.

Tabel 14
Hasil Perhitungan Korelasi antara Karakteristik Individu dengan Perilaku Komunikasi

Korelasi	Koefisien korelasi	t hitung	t Tabel	Keterangan
Usia–perilaku komunikasi	-0,003	-0,024	1,9966	Tidak signifikan
Pendidikan–perilaku komunikasi	0,139	1,217	1,9966	Tidak signifikan
Jabatan–perilaku komunikasi	0,267	2,534	1,9966	Signifikan
Golongan–perilaku komunikasi	0,247	2,312	1,9966	Signifikan

Sumber: Diolah dari data primer, 2005

Dengan demikian, hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat hubungan antara karakteristik individu dengan perilaku komunikasi dapat disimpulkan bahwa dari 4 karakteristik individu yang diuji hanya 2 yang menunjukkan hubungan yang nyata dengan perilaku komunikasi, yaitu jabatan dan golongan.

Data Tabel 14 menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan nyata dengan perilaku komunikasi adalah jabatan dan golongan. Semakin tinggi golongan dan jabatan akan semakin tinggi perilaku komunikasi mereka dalam PUG.

4. Simpulan dan Saran

4.1 Simpulan

Karakteristik individu aparat Pemda kabupaten di era otonomi daerah yang berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG) di Pemda Kabupaten Lampung Timur adalah jenis kelamin. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan pemahaman tentang konsep gender dan PUG oleh aparat Pemda perempuan dan laki-laki. Aparat Pemda perempuan lebih memahami konsep gender dan PUG secara benar karena mereka lebih banyak mengikuti kegiatan sosialisasi tentang gender dan PUG. Variabel golongan berhubungan nyata dengan partisipasi aparat Pemda kabupaten

dalam pelaksanaan PUG di era otonomi daerah. Semakin tinggi golongan, partisipasi aparat dalam pelaksanaan PUG juga semakin meningkat sebagai konsekuensi dari golongan dan jabatan yang lebih tinggi di struktur formal pemerintahan. Sedangkan variabel usia, pendidikan, dan jabatan aparat Pemda Kabupaten di era otonomi daerah tidak berhubungan nyata dengan persepsi dan partisipasi mereka dalam pelaksanaan PUG karena tidak dimilikinya pemahaman yang benar tentang konsep gender dan PUG sebagai akibat dari tidak berjalannya proses sosialisasi kedua konsep tersebut secara tepat ke seluruh aparat. Faktor penyebab lain adalah belum diterbitkannya Surat Keputusan Bupati sebagai payung hukum pelaksanaan PUG dalam pembangunan Kabupaten Lampung Timur.

Jenis kelamin, jabatan dan golongan aparat Pemda kabupaten di era otonomi daerah berhubungan nyata dengan perilaku komunikasi aparat Pemda kabupaten dalam PUG. Hubungan ini terjadi karena beberapa hal yaitu: (1) adanya perbedaan persepsi aparat perempuan dan laki-laki tentang PUG, (2) perbedaan yang signifikan dari jumlah aparat laki-laki dan perempuan yang menduduki jabatan struktural, dan (3) terkait dengan fungsi dan kebijakan pemerintah Kabupaten Lampung Timur tentang pelaksanaan PUG.

*Perilaku Komunikasi Aparat Pemda Kabupaten dalam Pengarusutamaan
Gender di Era Otonomi Daerah*

Perilaku komunikasi aparat Pemda kabupaten memiliki hubungan yang signifikan dengan persepsi dan partisipasi dalam pelaksanaan PUG di era otonomi daerah. Rendahnya akses aparat Pemda terhadap informasi PUG baik melalui media interpersonal maupun media massa, menyebabkan rendahnya tingkat persepsi aparat Pemda Kabupaten Lampung Timur terhadap PUG. Perilaku komunikasi interpersonal yang berkorelasi tinggi pada tingkat partisipasi kegiatan PUG lebih banyak disebabkan oleh faktor jabatan dan kedudukan.

4.2 Saran

Sosialisasi tentang program pengarusutamaan gender di Pemda Kabupaten Lampung Timur perlu ditingkatkan baik melalui pelatihan maupun media massa lokal khususnya. Rendahnya persepsi pegawai Pemda Kabupaten Lampung Timur terhadap PUG perlu diatasi dengan penyelenggaraan pelatihan khusus tentang PUG bagi Pejabat Struktural Kabupaten Lampung Timur. Penerbitan Surat Keputusan Bupati tentang PUG dalam Pembangunan Kabupaten Lampung Timur harus segera direalisasikan oleh Pemda sebagai dasar pelaksanaan

program PUG di Kabupaten Lampung Timur.

Daftar Pustaka

- BPS. 2004. Lampung Timur Dalam Angka. Pemda Kabupaten Lampung Timur. BPS Kabupaten Lampung Timur. Sukadana.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2002, Apa Itu Gender, Buku 1-4, Bahan Informasi Pengarusutamaan Gender, Edisi ke-2.
- Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI. 2005. Kebijakan Dan Program Pemberdayaan Perempuan.
<http://www.menegpp.go.id/menegpp.php?cat=fix&id=kebijakan>.
- Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 2002. Perencanaan Strategik (RENSTRA) Tahun 2001 – 2005. Bagian Sosial SETDAKAB LAM-TIM. Sukadana..
- Raharjo, Yulfita. 1997. *Gender, Population and Development Concepts and Issues* dalam Gender, Population and Development Staff Training Manual. PPT-LIPI and UNFPA.
- Sugiyono. 2001. Statistika untuk Penelitian. Alfabeta, Bandung.